

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

018.06.0200.411962.000.KD



BBPMSOH



2021

Laporan Semester II

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur - Bogor

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BBPMSOH adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BBPMSOH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BBPMSOH. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 21 Januari 2022
Kepala Balai Besar,



drh. Maidaswar, M.Si
NIP. 196705191994031001

RP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
B.2. Belanja	21
B.3. Belanja Pegawai	22
B.4. Belanja Barang	23
B.5. Belanja Modal	23
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.5.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	25
C.1.2. Piutang Bukan Pajak	25
C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	26
C.1.4. Persediaan	26
C.2. Aset Tetap	
C.2.1. Tanah	27
C.2.2. Peralatan dan Mesin	27
C.2.3. Gedung dan Bangunan	28
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	
C.3.1. Aset Lain-lain	29
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	30
C.4. Ekuitas	
C.4.1. Ekuitas	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31
D.2. Beban Pegawai	32
D.3. Beban Persediaan	33
D.4. Beban Barang dan Jasa	33
D.5. Beban Pemeliharaan	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas	35
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	36
D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37
D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	

E.1.	Ekuitas Awal	39
E.2.	Surplus/Defisit-LO	39
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	39
E.3.1.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	39
E.4.	Transaksi Antar Entitas	39
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	39
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	39
E.5.	Ekuitas Akhir	40
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1.	Belanja Akun 526	41
F.2.	Belanja Anggaran PC PEN	41
F.3.	Piutang Kepada PT. Ziya Sunanda	43

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BBPMSOH yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 21 Januari 2022
Kepala Balai Besar,



drh. Maidaswar, M.Si
NIP. 196705191994031001

AP

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRASIT
 Tanggal : 21 January 2022
 Halaman : 1
 Prog.id : lu_pastkt

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1	PENERIMAAN NEGARA	2,500,000,000	3,225,356,891	725,356,891	129.01	2,586,000,000	3,353,732,039	767,732,039	129.69
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,500,000,000	3,225,356,891	725,356,891	129.01	2,586,000,000	3,353,732,039	767,732,039	129.69
A.1.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	2,500,000,000	3,225,356,891	725,356,891	129.01	2,586,000,000	3,353,732,039	767,732,039	129.69
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni	38,119,220,000	32,399,843,364	(5,719,376,636)	85.00	25,212,356,000	25,006,273,749	(206,082,251)	99.18
B.1.1.a	Belanja Pegawai	6,255,178,000	6,231,859,855	(23,318,145)	99.63	6,281,722,000	6,181,513,376	(100,208,624)	96.40
B.1.1.b	Belanja Barang	27,628,992,000	21,935,994,709	(5,692,997,291)	79.39	11,205,134,000	11,119,261,173	(85,872,827)	99.23
B.1.1.c	Belanja Modal	4,235,050,000	4,231,988,800	(3,061,200)	99.93	7,725,500,000	7,705,499,200	(20,000,800)	99.74
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.1.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	38,119,220,000	32,399,843,364	(5,719,376,636)	85.00	25,212,356,000	25,006,273,749	(206,082,251)	99.18
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.1.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRAST
 Tanggal : 21 January 2022
 Halaman : 2
 Prog id : lu_pas/44

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Bogor, 21 Januari 2021
 Kepala Kantor



drh. Mairaswar, M.Si
 NIP. 196705191994031001

NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIET
Tanggal : 28/01/22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	580,910,000	0	580,910,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	145,275,500	0	145,275,500	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(7,263,775)	0	(7,263,775)	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>138,011,725</i>	<i>0</i>	<i>138,011,725</i>	<i>0.00</i>
Persediaan	374,716,475	119,141,735	255,574,740	214.51
JUMLAH ASET LANCAR	1,093,638,200	119,141,735	974,496,465	817.93
ASET TETAP				
Tanah	15,765,000,000	0	15,765,000,000	0.00
Peralatan dan Mesin	76,249,598,974	72,727,569,924	3,522,029,050	4.84
Gedung dan Bangunan	27,140,047,000	27,140,047,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,559,332,650	1,559,332,650	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(58,103,115,851)	(51,151,655,513)	(6,951,460,338)	13.58
JUMLAH ASET TETAP	62,610,862,773	50,275,294,061	12,335,568,712	24.53
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	150,198,700	(150,198,700)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	(150,198,700)	150,198,700	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	0.00
JUMLAH ASET	63,704,500,973	50,394,435,796	13,310,065,177	26.41
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	63,704,500,973	50,394,435,796	13,310,065,177	26.41
JUMLAH EKUITAS	63,704,500,973	50,394,435,796	13,310,065,177	26.41
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	63,704,500,973	50,394,435,796	13,310,065,177	26.41

Bogor, 21 Januari 2021
Kepala Kantor



drh. Maidaswar, M.Si
NIP. 196705191994031001

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	580,910,000	
0	115212	Piutang Lainnya	145,275,500	
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		7,263,775
0	117111	Barang Konsumsi	132,870,525	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,731,200	
0	117131	Bahan Baku	219,688,750	
0	117199	Persediaan Lainnya	18,426,000	
0	131111	Tanah	15,765,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	76,249,598,974	
0	133111	Gedung dan Bangunan	27,140,047,000	
0	134111	Jalan dan Jembatan	823,137,400	
0	134112	Irigasi	481,183,000	
0	134113	Jaringan	255,012,250	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		51,865,119,646
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		5,881,722,914
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		142,848,962
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		64,771,283
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		148,653,046
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		32,399,843,364
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,225,356,891	
0	313221	Transfer Masuk		26,939,303
0	391111	Ekuitas		50,394,435,796
3	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		5,320,000
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		119,870,999
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		15,751,346
3	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya		3,060,966,000
3	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		3,060,000
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		153,644,046
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		12,020,000
3	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		15,765,000,000
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,080,561,400	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	62,571	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		191
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	313,249,870	
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	78,743,510	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	60,570,000	
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		1,620,000
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	683,390,000	
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		370,000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	29,725,395	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	221,967,300	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	636,939,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	48,720,000	
3	512211	Beban Uang Lembur	79,921,000	
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,428,672,392	
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	128,261,365	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,691,700	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174,720,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	274,257,758	
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	274,750,300	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	27,630,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	715,789,973	
3	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	564,690,800	
3	522111	Beban Langganan Listrik	1,623,820,766	
3	522112	Beban Langganan Telepon	3,903,936	
3	522151	Beban Jasa Profesi	13,653,000	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	207,657,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508,942,226	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,123,271,710	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	858,442,288	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		72,000
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,289,000	
3	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	915,513,344	
3	524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		76,200
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,035,662	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,584,861,566	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,470,430,734	
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29,836,784	
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	16,192,821	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,127,486	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	903,322,858	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	46,391,510	
3	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,004,100,000	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,268,744,431	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	512,016,150	
3	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7,263,775	
		J U M L A H	160,069,368,871	160,069,368,871

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	5,719,376,636	
0	219711	Utang Kepada KUN	725,356,891	
2	425289	Estimasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya Yang Dialokasikan	2,500,000,000	
2	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS		4,081,325,000
2	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS		67,000
2	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		313,934,000
2	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS		78,874,000
2	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS		61,430,000
2	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS		685,040,000
2	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS		29,940,000
2	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS		222,398,000
2	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS		650,570,000
2	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS		51,600,000
2	512211	Allotment Belanja Uang Lembur		80,000,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		1,429,170,000
2	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		128,269,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		4,735,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		174,960,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		274,400,000
2	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		275,000,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		27,820,000
2	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya		717,934,000
2	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		708,500,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		3,283,864,000
2	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		704,000,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		1,624,200,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		4,140,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		14,350,000
2	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		220,000,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		509,960,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1,124,177,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		861,003,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		21,000,000
2	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		1,050,000,000
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		77,510,000
2	526322	Allotment Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19		14,394,000,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		3,654,050,000
2	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19		581,000,000
3	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		5,320,000
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		119,870,999
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		15,751,346
3	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya		3,060,966,000
3	425699	Pendapatan Jasa Lainnya		3,060,000
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		8,368,546
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		12,020,000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,080,561,400	
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62,571	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		191
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	313,249,870	
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,743,510	
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	60,570,000	
3	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS		1,620,000
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	683,390,000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		370,000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	29,725,395	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	221,967,300	
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	636,939,000	
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	48,720,000	
3	512211	Belanja Uang Lembur	79,921,000	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,428,672,392	
3	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	128,261,365	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,691,700	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	174,720,000	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 28-01-22
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	274,257,758	
3	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	274,750,300	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,630,000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	715,789,973	
3	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	564,690,800	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,282,783,378	
3	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	703,266,311	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	1,623,820,766	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	3,903,936	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	13,653,000	
3	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	207,657,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508,942,226	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,123,271,710	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	858,442,288	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		72,000
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,289,000	
3	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	915,513,344	
3	524115	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		76,200
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,035,662	
3	526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	9,004,100,000	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,651,421,800	
3	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	580,567,000	
		J U M L A H	41,346,715,282	41,346,715,282

LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	5,320,000	47,393,610	(42,073,610)	(88.77)
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,751,346	16,386,236	(634,890)	(3.87)
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3,060,966,000	3,210,158,000	(149,192,000)	(4.64)
425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	18,018,000	(18,018,000)	(100.00)
425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	6,400,000	(6,400,000)	(100.00)
425699 Pendapatan Jasa Lainnya	3,060,000	0	3,060,000	0.00
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153,644,046	0	153,644,046	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,238,741,392	3,298,355,846	(59,614,454)	(1.80)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,238,741,392	3,298,355,846	(59,614,454)	(1.80)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	3,238,741,392	3,298,355,846	(59,614,454)	(1.80)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	4,080,561,400	4,181,111,760	(100,550,360)	(2.40)
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	62,380	56,788	5,592	9.84
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	313,249,870	311,434,840	1,815,030	0.58

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
511122 Beban Tunj. Anak PNS	78,743,510	77,901,446	842,064	1.08
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	58,950,000	101,505,000	(42,555,000)	(41.92)
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	683,020,000	492,824,917	190,195,083	38.59
511125 Beban Tunj. PPh PNS	29,725,395	24,316,325	5,409,070	22.24
511126 Beban Tunj. Beras PNS	221,967,300	192,999,300	28,968,000	15.00
511129 Beban Uang Makan PNS	636,939,000	662,291,000	(25,352,000)	(3.82)
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	48,720,000	67,675,000	(18,955,000)	(28.00)
512211 Beban Uang Lembur	79,921,000	69,397,000	10,524,000	15.16
Jumlah Beban Pegawai	6,231,859,855	6,181,513,376	50,346,479	0.81
Beban Persediaan				
593111 Beban Persediaan konsumsi	903,322,858	857,245,394	46,077,464	5.37
593131 Beban Persediaan bahan baku	2,268,744,431	2,183,096,164	85,648,267	3.92
593149 Beban persediaan lainnya	512,016,150	541,790,000	(29,773,850)	(5.49)
Jumlah Beban Persediaan	3,684,083,439	3,582,131,558	101,951,881	2.84
Beban Barang dan Jasa				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	1,428,672,392	1,328,867,885	99,804,507	7.51
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	128,261,365	0	128,261,365	0.00
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,691,700	3,308,000	1,383,700	41.82
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174,720,000	103,950,000	70,770,000	68.08
521119 Beban Barang Operasional Lainnya	274,257,758	480,974,200	(206,716,442)	(42.97)
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	274,750,300	0	274,750,300	0.00
521213 Beban Honor Output Kegiatan	27,630,000	31,590,000	(3,960,000)	(12.53)
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	715,789,973	574,725,864	141,064,109	24.54
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	564,690,800	125,227,300	439,463,500	350.93
522111 Beban Langganan Listrik	1,623,820,766	1,600,640,229	23,180,537	1.44
522112 Beban Langganan Telepon	3,903,936	3,663,390	240,546	6.56
522141 Beban Sewa	0	15,680,000	(15,680,000)	(100.00)
522151 Beban Jasa Profesi	13,653,000	71,700,000	(58,047,000)	(80.95)
522191 Beban Jasa Lainnya	0	30,659,000	(30,659,000)	(100.00)
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	207,657,000	117,112,000	90,545,000	77.31
Jumlah Beban Barang dan Jasa	5,442,498,990	4,488,097,868	954,401,122	21.26
Beban Pemeliharaan				
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508,942,226	729,780,105	(220,837,879)	(30.26)
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,123,271,710	1,319,841,504	(196,569,794)	(14.89)
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	46,391,510	144,470,050	(98,078,540)	(67.88)
593114 Beban Persediaan suku cadang	0	75,309,400	(75,309,400)	(100.00)
Jumlah Beban Pemeliharaan	1,678,605,446	2,269,401,059	(590,795,613)	(26.03)
Beban Perjalanan Dinas				
524111 Beban Perjalanan Biasa	858,370,288	605,025,793	253,344,495	41.87

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,289,000	71,790,000	(51,501,000)	(71.73)
524115 Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	915,437,144	49,980,000	865,457,144	1,731.60
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,035,662	203,428,600	(126,392,938)	(62.13)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1,871,132,094	930,224,393	940,907,701	101.15
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9,004,100,000	0	9,004,100,000	0.00
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	9,004,100,000	0	9,004,100,000	0.00
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,584,861,566	5,377,184,195	207,677,371	3.86
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,470,430,734	1,470,430,735	(1)	0.00
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29,836,784	20,992,295	8,844,489	42.13
591312 Beban Penyusutan Irigasi	16,192,821	16,192,821	0	
591313 Beban Penyusutan Jaringan	6,127,486	6,127,486	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
594212 Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7,263,775	0	7,263,775	0.00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7,263,775	0	7,263,775	0.00
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	35,026,992,990	24,342,295,786	10,684,697,204	43.89
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(31,788,251,598)	(21,043,939,940)	(10,744,311,658)	(51.05)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	119,870,999	10,799,999	109,071,000	(1,009.91)
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	119,870,999	10,799,999	109,071,000	1,009.90
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	13,719,970	(13,719,970)	(100.00)
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	13,719,970	(13,719,970)	(100.00)

**LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	119,870,999	(2,919,971)	122,790,970	4,205.21
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	5,881,200	(5,881,200)	(100.00)
425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	15,924,500	(15,924,500)	(100.00)
425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	22,770,397	(22,770,397)	(100.00)
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12,020,000	97	12,019,903	*** **
491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	15,765,000,000	0	15,765,000,000	0.00
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	600,000	(600,000)	(100.00)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,777,020,000	45,176,194	15,731,843,806	34,823.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	112,500	(112,500)	(100.00)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	112,500	(112,500)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15,777,020,000	45,063,694	15,731,956,306	34,910.48
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	15,896,890,999	42,143,723	15,854,747,276	37,621.00
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15,891,360,599)	(21,001,796,217)	5,110,435,618	24.33

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5

Bogor, 21 Januari 2021

Kepala Kantor



drh. Maidaswar, M.Si

NIP. 196705191994031001

fp

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT SATUAN KERJA**
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
 UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : 411962 BBPMSOH

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	50,394,435,796	50,417,690,303	(23,254,507)	(0.04)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,891,360,599)	(21,001,796,217)	5,110,435,618	(24.33)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	29,201,425,776	20,978,541,710	8,222,884,066	39.19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	13,310,065,177	(23,254,507)	13,333,319,684	(57,336.49)
EKUITAS AKHIR	63,704,500,973	50,394,435,796	13,310,065,177	26.41

Bogor, 21 Januari 2021

Kepala Kantor



drh. Maidaswar, M.Si

NIP. 196705191994031001

AP

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BBPMSOH Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.225.356.891,00 atau mencapai 129,01% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.500.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp32.399.843.364,00 atau mencapai 85,00% dari alokasi anggaran sebesar Rp38.119.220.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp63.704.500.973,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.093.638.200,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp62.610.862.773,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp63.704.500.973,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.238.741.392,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp35.026.992.990,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-31.788.251.598,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp15.896.890.999,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-15.891.360.599,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp50.394.435.796,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-15.891.360.599,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp29.201.425.776,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp63.704.500.973,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BBPMSOH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.500.000.000,00	3.225.356.891,00	129,01	3.353.732.039,00
Jumlah Pendapatan		2.500.000.000,00	3.225.356.891,00	129,01	3.353.732.039,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.255.178.000,00	6.231.859.855,00	99,63	6.181.513.376,00
Belanja Barang	B.4.	27.628.992.000,00	21.935.994.709,00	79,39	11.119.261.173,00
Belanja Modal	B.5.	4.235.050.000,00	4.231.988.800,00	99,93	7.705.499.200,00
Jumlah Belanja		38.119.220.000,00	32.399.843.364,00	85,00	25.006.273.749,00

II. NERACA

**BBPMSOH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.	580.910.000,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	145.275.500,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-7.263.775,00	0,00
Persediaan	C.1.4.	374.716.475,00	119.141.735,00
Jumlah Aset Lancar		1.093.638.200,00	119.141.735,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	15.765.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	76.249.598.974,00	72.727.569.924,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	27.140.047.000,00	27.140.047.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.559.332.650,00	1.559.332.650,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-58.103.115.851,00	-51.151.655.513,00
Jumlah Aset Tetap		62.610.862.773,00	50.275.294.061,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	150.198.700,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0,00	-150.198.700,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset		63.704.500.973,00	50.394.435.796,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	63.704.500.973,00	50.394.435.796,00
Jumlah Ekuitas		63.704.500.973,00	50.394.435.796,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		63.704.500.973,00	50.394.435.796,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BBPMSOH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	3.238.741.392,00	3.298.355.846,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.238.741.392,00	3.298.355.846,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.231.859.855,00	6.181.513.376,00
Beban Persediaan	D.3.	3.684.083.439,00	3.582.131.558,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5.442.498.990,00	4.488.097.868,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1.678.605.446,00	2.269.401.059,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.871.132.094,00	930.224.393,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	9.004.100.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	7.107.449.391,00	6.890.927.532,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	7.263.775,00	0,00
JUMLAH BEBAN		35.026.992.990,00	24.342.295.786,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-31.788.251.598,00	-21.043.939.940,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	119.870.999,00	10.799.999,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	13.719.970,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	15.777.020.000,00	45.176.194,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	0,00	112.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		15.896.890.999,00	42.143.723,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-15.891.360.599,00	-21.001.796.217,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BBPMSOH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	50.394.435.796,00	50.417.690.303,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-15.891.360.599,00	-21.001.796.217,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	29.201.425.776,00	20.978.541.710,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	13.310.065.177,00	-23.254.507,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	63.704.500.973,00	50.394.435.796,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BBPMSOH

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi "Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Guna mendukung upaya pemerintah tersebut Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diantaranya adalah melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan, pelaksanaan sertifikasi obat hewan, pelaksanaan pengkajian obat hewan, pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar, pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan, pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan, pengelolaan hewan percobaan, pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan, pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan, pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan, pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi, pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan, pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan, pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan, pengkajian batas maksimum residu obat hewan, pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan, pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan, pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan, pemberian pelaksanaan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BBPMSOH. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BBPMSOH menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BBPMSOH dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BBPMSOH yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPMSOH adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BBPMSOH telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.283.196.000,00	6.175.178.000,00
Belanja Lembur	80.000.000,00	80.000.000,00
Belanja Barang Operasional	2.096.434.000,00	2.286.534.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.462.940.000,00	1.454.254.000,00
Belanja Barang Persediaan	3.748.000.000,00	3.987.864.000,00
Belanja Jasa	1.942.000.000,00	1.862.690.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.724.677.000,00	1.634.137.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.736.000.000,00	2.009.513.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	23.250.000.000,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	14.394.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.276.000.000,00	4.235.050.000,00
Jumlah Belanja	50.599.247.000,00	38.119.220.000,00

Sampai dengan Semester II Anggaran Tahun 2021 di BBPMSOH telah mengalami revisi sebanyak 10 kali, dimana revisi terakhir pada tanggal 28 Desember 2021.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.225.356.891,00 atau mencapai 129,01% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.500.000.000,00	3.060.966.000,00	122,44
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	140.942.345,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	8.368.546,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	3.060.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	12.020.000,00	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00	3.225.356.891,00	129,01

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -3,83% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BBPMSOH adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	3.060.966.000,00	3.210.158.000,00	-4,65
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	44.576.097,00	-100,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	140.942.345,00	74.579.845,00	88,98
Pendapatan Denda	8.368.546,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	3.060.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	12.020.000,00	97,00	12.391.652,58
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	24.418.000,00	-100,00
Jumlah	3.225.356.891,00	3.353.732.039,00	-3,83

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebesar Rp3.060.966.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari sertifikasi obat hewan. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha sebesar Rp140.942.345,00 diperoleh dari 3 akun pendapatan yaitu pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, pendapatan penjualan peralatan dan mesin, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan berupa penjualan sapi afkir selesai pengujian sebesar Rp5.320.000,00. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp 119.870.999,00 berupa 2 unit mobil masing-masing Rp56.570.000,00 dan

Rp60.799.999, serta 1 unit sepeda motor sebesar Rp2.501.000,00. Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan diperoleh dari sewa rumah dinas sebesar Rp15.751.346,00.

Pendapatan denda sebesar Rp 8.368.546,00 diperoleh dari denda keterlambatan pengiriman barang oleh CV. Prima Duta Utama sebesar Rp47.600,00, CV. Mandiri Persada sebesar Rp2.142.652,00, CV. Buana Jaya Rp367.040,00, CV. Citra Utama Rp1.118.580,00, CV. Tirta Scientific Supplies Rp220.174,00, CV. Cipta Karya Pribadi sebesar Rp 1.210.000,00 dan CV. Putra Ramadhan Perkasa sebesar Rp 3.262.500,00

Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 3.060.000,00 diperoleh dari penjualan mencit kepada Dalilatul Maisuroh sebesar Rp900.000,00, PT. Vaksindo Satwa Nusantara sebesar Rp1.800.000,00, dan PT. Biotis Pharmaceuticals sebesar Rp360.000,00. Sedangkan pendapatan lain-lain sebesar Rp12.020.000,00 diperoleh dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu atas nama drh. Maidaswar, M.Si, drh. Hany Mucharini, drh. Emilia, M.Si, drh. Hari Sakti P, drh. Lilis Sri Astuti, Mustopa Kamal, Wahyudin, S.sos, Muhammmad Zahid, S.Si, Apt, M.Sc, drh. Syaefurrosyad, dan drh. Alim Hakim.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp32.399.843.364,00 atau 85,00% dari anggaran belanja sebesar Rp38.119.220.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.255.178.000,00	6.233.850.046,00	99,66
Belanja Barang	27.628.992.000,00	21.936.142.909,00	79,40
Belanja Modal	4.235.050.000,00	4.231.988.800,00	99,93
Total Belanja Kotor	38.119.220.000,00	32.401.981.755,00	85,00
Pengembalian Belanja		-2.138.391,00	0,00
Total Belanja	38.119.220.000,00	32.399.843.364,00	85,00

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 29,57% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya belanja akun 526 terkait Program Kegiatan Ruminansia Potong dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.004.100.000,-
2. Adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai sehingga belanja pegawai menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Adanya transformasi jabatan dari 8 pegawai di BBPMSOH dari fungsional umum ke fungsional khusus.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	6.231.859.855,00	6.181.513.376,00	0,81
Belanja Barang	21.935.994.709,00	11.119.261.173,00	97,28
Belanja Modal	4.231.988.800,00	7.705.499.200,00	-45,08
Total Belanja	32.399.843.364,00	25.006.273.749,00	29,57

Belanja barang sebesar Rp 21.935.994.709,00 digunakan untuk belanja akun 5221 sebesar Rp 1.849.034.702,00, belanja akun 5231 sebesar Rp 1.632.213.936, belanja akun 5241 sebesar Rp 1.871.280.294,00 dan belanja akun 5263 sebesar Rp 9.004.100.000,00.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.231.859.855,00 dan Rp6.181.513.376,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,81% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat dan jabatan pegawai, dimana terdapat transformasi 8 pegawai dari jabatan fungsional umum ke fungsional khusus. Pegawai tersebut diantaranya drh. Hany Mucharini, drh. Emilia, M.Si, drh. Lilis Sri Astuti, drh. Alim Hakim, drh. M. Syaefurrosad, drh. Hari Sakti Pancasunu, Muhammad Zahid, S.Si, Apt, M.sc, Sadar Rasidan, A.Md
2. Adanya peningkatan uang lembur pegawai, dimana pada TA 2021 banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di luar hari kerja.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.153.929.046,00	6.112.861.459,00	0,67
Belanja Lembur	79.921.000,00	69.397.000,00	15,16
Jumlah Belanja Kotor	6.233.850.046,00	6.182.258.459,00	0,83
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.990.191,00	-745.083,00	167,11
Jumlah Belanja	6.231.859.855,00	6.181.513.376,00	0,81

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp21.935.994.709,00 dan Rp11.119.261.173,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 97,28% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda, berupa bantuan sapi potong dari program Ruminansia Potong dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.004.100.000,- dimana hal tersebut merupakan capaian dari distribusi ternak ke 35 kelompok tani ternak dengan jumlah ternak sebanyak 695 ekor.
2. Adanya peningkatan belanja operasional untuk belanja keperluan kantor, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor satuan kerja, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang penanganan pandemi COVID-19.
3. Adanya peningkatan perjalanan dalam negeri, hal ini terkait dengan kegiatan pengkajian, pemantauan, kegiatan bantuan Masyarakat/Pemda, serta perjalanan dinas lain terkait kegiatan balai.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.285.353.515,00	1.917.100.085,00	19,21
Belanja Barang Non Operasional	1.308.110.773,00	731.543.164,00	78,82
Belanja Barang Persediaan	3.986.049.689,00	3.651.317.303,00	9,17
Belanja Jasa	1.849.034.702,00	1.839.454.619,00	0,52
Belanja Pemeliharaan	1.632.213.936,00	2.049.621.609,00	-20,37
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.871.280.294,00	930.666.493,00	101,07
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	9.004.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	21.936.142.909,00	11.119.703.273,00	97,27
Pengembalian Belanja Barang	-148.200,00	-442.100,00	-66,48
Jumlah Belanja	21.935.994.709,00	11.119.261.173,00	97,28

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.231.988.800,00 dan Rp7.705.499.200,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -45,08% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja modal dikarenakan adanya penurunan anggaran belanja modal dimana anggaran belanja modal pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.235.050.000,00

**Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.231.988.800,00	7.227.896.800,00	-41,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	477.602.400,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	4.231.988.800,00	7.705.499.200,00	-45,08
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.231.988.800,00	7.705.499.200,00	-45,08

Belanja modal peralatan dan mesin terbagi menjadi 2 akun yaitu akun 532111 dan 532119. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan akun 532111 sebesar Rp 3.651.421.800,-, sedangkan belanja modal peralatan dan mesin-penanganan pandemic COVID-19 pada akun 532119 sebesar Rp 580.567.000. Belanja modal akun penanganan pandemic COVID-19 digunakan untuk pengadaan 1 buah Biological Safety Cabinet, belanja mesin pendingin ruangan dan mesin cuci, serta pengadaan storage cabinet.

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.231.988.800,00 dan Rp7.227.896.800,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -41,45% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan belanja modal dikarenakan adanya penurunan anggaran belanja modal dimana anggaran belanja modal pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.235.050.000,00

**Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.231.988.800,00	7.227.896.800,00	-41,45
Jumlah Belanja Kotor	4.231.988.800,00	7.227.896.800,00	-41,45
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	4.231.988.800,00	7.227.896.800,00	-41,45

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp580.910.000,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang muka belanja modal dan peralatan mesin	580.910.000,00	0,00
Jumlah	580.910.000,00	0,00

Saldo Belanja dibayar dimuka (prepaid) per 31 Desember sebesar Rp580.910.000,00 merupakan piutang pembayaran uang muka pembelian mesin Kjeldahl Merk Buchi sebanyak 20% dari total nilai kontrak kepada PT. Ziya Sunanda Indonesia, dimana kontraknya telah diputus berdasarkan surat Pemutusan Kontrak Nomor: 1 4005/P1.030/F5.I/10/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Besar kontrak tersebut Rp 2.904.550.000,00, sehingga besar pembayaran uang muka mesin tersebut adalah Rp 580.910.000,00. Tagihan piutang uang muka telah disampaikan kepada PT. Ziya Sunanda, namun sampai laporan ini dibuat belum terdapat penyelesaian pembayaran. Data tagihan tertuang dalam Kode Billing nomor: 820220125609767 tanggal 25 Januari 2022 dengan tanggal kadaluwarsa 1 Februari 2022.

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp145.275.500,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Lainnya	145.275.500,00	0,00
Jumlah	145.275.500,00	0,00

Saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp145.275.500,00 merupakan penagihan piutang lainnya berupa bank garansi PT. Ziya Sunanda senilai Rp145.275.500,00 dengan data tagihan tertuang pada kode billing 82020125611010 tanggal 25 Januari dan tanggal kadaluwarsa 1 Februari 2022.

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7.263.775,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	145.275.500	0,5%	-7.263.775,00

Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp-7.263.775,00 merupakan apenyisihan dari piutang bank garansi PT. Ziya Sunanda senilai Rp145.275.000,00.

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp374.716.475,00 dan Rp119.141.735,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	132.870.525,00	51.606.485,00
Bahan untuk Pemeliharaan	3.731.200,00	5.057.250,00
Bahan Baku	219.688.750,00	4.218.000,00
Persediaan Lainnya	18.426.000,00	58.260.000,00
Jumlah	374.716.475,00	119.141.735,00

Persediaan berupa barang konsumsi senilai Rp132.870.525,00 merupakan anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang untuk kegiatan operasional kantor yang berupa bahan alat tulis kantor bahan cetakan, bahan penunjang hewan percobaan dan penunjang operasional bahan bakar untuk genset kantor dan BSL 3, serta N2 cair. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp3.731.200,00 digunakan untuk pengadaan bahan kebersihan untuk kegiatan kantor.

Persediaan bahan baku senilai Rp219.688.750,00 merupakan bahan kimia serta bahan penunjang lainnya yang digunakan untuk kegiatan pengujian di laboratorium

berupa bahan kimia padat dan bahan kimia cair yang masih tersimpan di gudang dan tercatat pada aplikasi persediaan serta rinciannya dapat dilihat pada stock opname gudang per 31 Desember tahun 2021. Adanya kualifikasi bahan baku tersebut disebabkan kualifikasi pada pendaftaran tabel barang persediaan di aplikasi persediaan merupakan bahan kimia dan penunjang, sedangkan pada neraca termasuk dalam bahan baku. Sedangkan persediaan lainnya berupa pembelian telur SPF untuk kegiatan pengujian.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.765.000.000,00 dan Rp0,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0,00
Mutasi Tambah	
Perolehan Lainnya	15.765.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	15.765.000.000,00

Mutasi transaksi penambahan tanah adalah berupa:

1. Penambahan tanah berasal dari perolehan lainnya berdasarkan keputusan Bupati Bogor Nomor: 591/446/Kpts/per-UU/2011 mengenai penetapan lokasi tanah. Nilai mutasi tambah berdasarkan nilai taksiran fatwa tanah dan surat permohonan penerbitan sertifikasi tanah Nomor: 20061/PL.020/F/03/2020 tanggal 20 Maret 2020. Luas tanah tersebut sebesar 55.000 m² yang terdiri dari 40.000 m² untuk bangunan, 10.000 m² untuk rumah dinas, dan 5.000 m² lahan kosong.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp76.249.598.974,00 dan Rp72.727.569.924,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	72.727.569.924,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	3.651.078.800,00
Transfer Masuk	377.150.250,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-379.850.000,00
Penghapusan	-3.350.000,00
Koreksi Pencatatan	-123.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	76.249.598.974,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-51.865.119.646,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	24.384.479.328,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi tambah yang berasal dari pembelian merupakan pembelian barang modal mesin dan peralatan sebesar 3.651.078.000,00. Pembelian peralatan berupa AC portable sebanyak 5 buah, lemari arsip 4 pintu, 1 buah biosafety Cabinet, pembelian capilar mesin sequencing, pembelian pompa air submersible, pembelian mesin Kjehdal, dan pembelian meja rapat.
2. Transfer masuk sebesar 377.150.250,00 berasal dari hibah 1 unit kendaraan Dirjen PKH.
3. Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp379.850.000,00 merupakan perubahan status dari barang rusak ringan ke rusak berat dengan risalah lelang nomor 875/32/2021 dan bukti setor NTPN 8C7073CIEOCOADIF yang pelaksanaan lelangnya sudah dilakukan di KPKNL Bogor secara terbuka. Barang bergerak yang dilelang berupa 1 unit mobil merk /tipe Kijang Grand Lux Luxury (UF81)/Kijang Krista, tahun 2004, nomor polisi F 1186 F. 1 unit mobil merk /tipe Kijang Grand Lux Luxury (UF81)/Kijang Krista, tahun 2004, nomor polisi F 1187 F. 1 unit sepeda motor merk/tipe Honda NF100L/Supra Fit tahun 2004.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.140.047.000,00 dan Rp27.140.047.000,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.559.332.650,00 dan Rp1.559.332.650,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-58.103.115.851,00 dan Rp-51.151.655.513,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian A

kumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	76.249.598.974,00	-51.865.119.646,00	24.384.479.328,00
2.	Gedung dan Bangunan	27.140.047.000,00	-5.881.722.914,00	21.258.324.086,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.559.332.650,00	-356.273.291,00	1.203.059.359,00
Akumulasi Penyusutan		104.948.978.624,00	-58.103.115.851,00	46.845.862.773,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp150.198.700,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BBPMSOH serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	150.198.700,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	379.850.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-150.198.700,00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-379.850.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi tambah sebesar Rp379.850.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk dari aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya.
2. Mutasi kurang merupakan pengurangan dari aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya dengan besaran nilai Rp150.198.700,00 dari jumlah penghapusan total aset sebesar Rp379.850.000,00
3. Usulan barang rusak berat senilai Rp379.850.000,00 merupakan perubahan status dari barang rusak ringan ke rusak berat dengan risalah lelang nomor 875/32/2021 dan bukti setor NTPN 8C7073CIEOCOADIF yang pelaksanaan lelangnya sudah dilakukan di KPKNL Bogor secara terbuka. Barang bergerak yang dilelang berupa 1 unit mobil merk/tipe Kijang Grand Lux Luxury

(UF81)/Kijang Krista, tahun 2004, nomor polisi F 1186 F. 1 unit mobil merk /tipe Kijang Grand Lux Luxury (UF81)/Kijang Krista, tahun 2004, nomor polisi F 1187 F. 1 unit sepeda motor merk/tipe Honda NF100L/Supra Fit tahun 2004 nomor polisi F 4067 F.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BBPMSOH per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-150.198.700,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp63.704.500.973,00 dan Rp50.394.435.796,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.238.741.392,00 dan Rp3.298.355.846,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	153.644.046,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	18.018.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	3.060.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0,00	6.400.000,00	-100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.060.966.000,00	3.210.158.000,00	-4,65
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	5.320.000,00	47.393.610,00	-88,77
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.751.346,00	16.386.236,00	-3,87
Jumlah	3.238.741.392,00	3.298.355.846,00	-1,81

PNBP pada Laporan Operasional sebesar Rp3.238.741.392,00 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.225.356.891,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.384.501,00. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan rincian yang tercantum pada LO dan LRA. Pada LO mencantumkan pendapatan penjualan hasil pertanian, pendapatan sewa tanah, pendapatan pengujian sertifikasi, pendapatan jasa lainnya dan pendapatan denda penyelesaian pemerintah. Sedangkan pada LRA mencantumkan pendapatan pengujian sertifikasi, pendapatan penjualan pengelolaan BMN, denda, jasa lain, dan pendapatan lainnya.

Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penjualan Pendapatan denda sebesar Rp 153.644.046,00 diperoleh dari denda keterlambatan pengiriman barang oleh CV. Prima Duta Utama sebesar Rp47.600,00, CV. Mandiri Persada sebesar Rp2.142.652,00, CV. Buana Jaya Rp367.040,00, CV. Citra Utama Rp1.118.580,00, CV. Tirta Scientific Supplies Rp220.174,00, CV. Cipta Karya Pribadi sebesar Rp 1.210.000,00 dan CV. Putra Ramadhan Perkasa sebesar Rp 3.262.500,00, serta piutang kepada PT. Ziya Sunanda yang berupa bank garansi senilai Rp145.275.500,00.

Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp 3.060.000,00 diperoleh dari penjualan mencit kepada Dalilatul Maisuroh sebesar Rp900.000,00, PT. Vaksindo Satwa Nusantara sebesar Rp1.800.000,00, dan PT. Biotis Pharmaceuticals sebesar Rp360.000,00.

Pendapatan administrasi dan penegakan hukum sebesar Rp3.060.966.000,00 merupakan pendapatan yang diperoleh dari sertifikasi obat hewan.

Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan berupa penjualan sapi afkir selesai pengujian sebesar Rp5.320.000,00. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp 119.870.999,00 berupa 2 unit mobil masing-masing Rp56.570.000,00 dan Rp60.799.999, serta 1 unit sepeda motor sebesar Rp2.501.000,00. Pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan diperoleh dari sewa rumah dinas sebesar Rp15.751.346,00.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.231.859.855,00 dan Rp6.181.513.376,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.080.561.400,00	4.181.111.760,00	-2,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	62.380,00	56.788,00	9,85
Beban Tunj. Anak PNS	78.743.510,00	77.901.446,00	1,08
Beban Tunj. Beras PNS	221.967.300,00	192.999.300,00	15,01
Beban Tunj. Fungsional PNS	683.020.000,00	492.824.917,00	38,59
Beban Tunj. PPh PNS	29.725.395,00	24.316.325,00	22,24
Beban Tunj. Struktural PNS	58.950.000,00	101.505.000,00	-41,92
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	313.249.870,00	311.434.840,00	0,58
Beban Tunjangan Umum PNS	48.720.000,00	67.675.000,00	-28,01
Beban Uang Lembur	79.921.000,00	69.397.000,00	15,16
Beban Uang Makan PNS	636.939.000,00	662.291.000,00	-3,83
Jumlah	6.231.859.855,00	6.181.513.376,00	0,81

Secara keseluruhan beban pegawai di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan mengalami kenaikan sebesar 0,81% jika dibandingkan dengan beban pada periode yang sama pada tahun 2020. Beban pegawai yang mengalami kenaikan cukup besar pada beban tunjangan fungsional PNS, dikarenakan transformasi jabatan dari fungsional umum ke fungsional khusus serta kenaikan pangkat dan jabatan dari beberapa pegawai fungsional yang ada. Kenaikan lainnya

juga terjadi pada beban uang lembur dikarenakan banyaknya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada jam kerja biasa sehingga harus diselesaikan diluar jam kerja.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.684.083.439,00 dan Rp3.582.131.558,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	2.268.744.431,00	2.183.096.164,00	3,92
Beban Persediaan konsumsi	903.322.858,00	857.245.394,00	5,38
Beban persediaan lainnya	512.016.150,00	541.790.000,00	-5,50
Jumlah	3.684.083.439,00	3.582.131.558,00	2,85

Belanja bahan persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.986.049.689,00 dan pada Laporan Operasional sebesar Rp3.684.083.439,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp301.966.250,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penggunaan bahan persediaan dari stok tahun sebelumnya. Persediaan bahan baku merupakan persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan pengujian berupa bahan kimia, baik bahan kimia cair, kimia padat, gas, dan kimia lainnya. Pada TA 2021 persediaan bahan baku mengalami kenaikan sebesar 3,92%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan target uji sampel ditingkat balai. Beban persediaan konsumsi merupakan bahan untuk kegiatan operasional kantor, beban ini juga mengalami peningkatan sebesar 5,36%. Sedangkan beban persediaan lainnya mengalami penurunan sebesar 5,50% dikarenakan berkurangnya penggunaan bahan uji berupa telur SPF.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.442.498.990,00 dan Rp4.488.097.868,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	564.690.800,00	125.227.300,00	350,93
Beban Barang Non Operasional Lainnya	715.789.973,00	574.725.864,00	24,54
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	274.750.300,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	274.257.758,00	480.974.200,00	-42,98
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	174.720.000,00	103.950.000,00	68,08
Beban Honor Output Kegiatan	27.630.000,00	31.590.000,00	-12,54
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	207.657.000,00	117.112.000,00	77,31
Beban Jasa Lainnya	0,00	30.659.000,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	13.653.000,00	71.700.000,00	-80,96
Beban Keperluan Perkantoran	1.428.672.392,00	1.328.867.885,00	7,51
Beban Langganan Listrik	1.623.820.766,00	1.600.640.229,00	1,45
Beban Langganan Telepon	3.903.936,00	3.663.390,00	6,57
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	128.261.365,00	0,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.691.700,00	3.308.000,00	41,83
Beban Sewa	0,00	15.680.000,00	-100,00
Jumlah	5.442.498.990,00	4.488.097.868,00	21,27

Secara keseluruhan beban anggaran atas barang dan jasa TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,27 % jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa TA 2020. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan beban yaitu beban Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu untuk biaya uji PCR karyawan, serta adanya Beban Penambah Daya Tahan Tubuh yang dipergunakan kuntuk pembelian bahan seperti vitamin.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.678.605.446,00 dan Rp2.269.401.059,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	508.942.226,00	729.780.105,00	-30,26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.123.271.710,00	1.319.841.504,00	-14,89
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	46.391.510,00	144.470.050,00	-67,89
Beban Persediaan suku cadang	0,00	75.309.400,00	-100,00
Jumlah	1.678.605.446,00	2.269.401.059,00	-26,03

Beban pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar Rp1.678.605.446,00 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.634.137.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp46.391.510,00. Hal tersebut dikarenakan adanya beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp46.391.510,00 yang tidak tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran namun tercantum pada Laporan Operasional. Beban pemeliharaan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 26,03%. Penurunan disebabkan oleh adanya perbaikan gedung yang telah banyak dilakukan pada tahun sebelumnya serta kondisi peralatan dan mesin yang masih memadai sehingga tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.871.132.094,00 dan Rp930.224.393,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	858.370.288,00	605.025.793,00	41,87
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	915.437.144,00	49.980.000,00	1.731,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.289.000,00	71.790.000,00	-71,74
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77.035.662,00	203.428.600,00	-62,13
Jumlah	1.871.132.094,00	930.224.393,00	101,15

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 101,15 %. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan beban perjalanan dinas untuk penanganan pandemi COVID-19, serta adanya peningkatan pada beban perjalanan biasa. Perjalanan biasa tersebut diantaranya untuk kegiatan pengkajian Unit Uji Farmasetik, Unit Uji Bakteriologi, Unit Uji Virologi, kegiatan pemantauan sampel obat hewan, serta kegiatan verifikasi program Ruminansia Potong di daerah Jawa Timur, Banten, dan Maluku.

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.004.100.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9.004.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah	9.004.100.000,00	0,00	0,00

Beban barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan sapi potong program Ruminansia Potong pada 35 kelompok yang terdapat di Provinsi Banten, Jawa Timur, Maluku dan Maluku Utara. Jumlah bantuan ternak sapi potong yang terealisasi sebanyak 695 ekor. Realisasi pada Provinsi Banten tahap 1 sebanyak 80 ekor dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp 1.076.000,00. Realisasi ternak sapi di Provinsi Jawa Timur tahap 1 sebanyak 275 ekor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.327.500.000,00. Realisasi ternak sapi di Provinsi Jawa Timur tahap 2 sebanyak 160 ekor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.175.000.000,00. Realisasi ternak sapi di Provinsi Maluku sebanyak 80 ekor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.048.000.000,00. Realisasi ternak sapi di Mauku Utara sebanyak 80 ekor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.096.000.000,00, dan realisasi ternak sapi di Provinsi Banten tahap 2 sebanyak 20 ekor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 281.600.000,00.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.107.449.391,00 dan Rp6.890.927.532,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.470.430.734,00	1.470.430.735,00	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	16.192.821,00	16.192.821,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	29.836.784,00	20.992.295,00	42,13
Beban Penyusutan Jaringan	6.127.486,00	6.127.486,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.584.861.566,00	5.377.184.195,00	3,86
Jumlah	7.107.449.391,00	6.890.927.532,00	3,14

Adanya kenaikan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 3,14 % disebabkan oleh:

1. Kenaikan penyusutan peralatan dan mesin karena adanya penambahan peralatan dan mesin di laboratorium.

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.263.775,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7.263.775,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang PNBK	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.263.775,00	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang lainnya sebesar Rp7.263.775,00 merupakan penyisihan piutang dari bank garansi atas nama PT. Ziya Sunanda senilai Rp145.275.500,00.

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-13.719.970,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-112.500,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	15.924.500,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0,00	5.881.200,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	22.770.397,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	600.000,00	-100,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	15.765.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	119.870.999,00	10.799.999,00	1.009,92
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.020.000,00	97,00	12.391.652,58
Jumlah	15.896.890.999,00	42.143.723,00	37.620,66

Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp15.765.000.000,00 merupakan aset tanah yang digunakan satker seluas 55.000 m². Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin merupakan pendapatan dari lelang barang BMN yaitu penjualan 2 unit mobil sebesar Rp56.570.000,00 dan Rp60.799.999,00, lelang 1 unit sepeda motor sebesar Rp2.501.000,00. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp12.020.000,00 diperoleh dari potongan kekurangan gaji pegawai atas nama drh. Maidaswar, M.Si, drh. Hany Mucharini, drh. Emilia, M.Si, drh. Hari Sakti Panca Sunu, drh. Lilis Sri Astuti, Mustopa Kamal, Wahyudin, S.sos, M. Zahid, drh. Syaefurrosyad, dan drh. Alim Hakim.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp50.394.435.796,00 dan Rp50.417.690.303,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-15.891.360.599,00 dan Rp-21.001.796.217,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.201.425.776,00 dan Rp20.978.541.710,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.399.843.364,00
Diterima dari Entitas Lain	-3.225.356.891,00
Transfer Masuk	26.939.303,00
Jumlah	29.201.425.776,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-3.225.356.891,00 sedangkan DKEL sebesar Rp32.399.843.364,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.939.303,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018060199238776000KP	377.150.250,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018060199238776000KP	-350.210.947,00
Jumlah			26.939.303,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.310.065.177,00 dan Rp-23.254.507,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Belanja Akun 526

Belanja akun 526 digunakan untuk pembelian sapi potong lokal dengan nilai Pagu sebesar Rp14.392.600.000,00 dan nilai realisasi sebesar Rp9.004.100.000,00. Rincian realisasi dapat dilihat pada table berikut:

Pengadaan	Nilai Pagu (RP)	Nilai Realisasi (RP)	Persentase (%)
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Banten tahap I	1.076.000.000	1.076.000.000	100
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur tahap I	8.716.000.000	3.327.500.000	38,17
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Maluku	1.048.000.000	1.048.000.000	100
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara	1.096.000.000	1.096.000.000	100
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Banten II	281.600.000	281.600.000	100
Sapi potong lokal untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur tahap II	2.175.000.000	2.175.000.000	100
Jumlah	14.392.600.000	9.004.100.000	62,56

Anggaran belanja pada akun 526 terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.388.500.000,00 dikarenakan adanya pemutusan kontrak oleh CV. Cipta Karya Pribadi yang merupakan penyedia untuk Provinsi Jawa Timur tahap I, dimana penyedia hanya mampu menyelesaikan 36% distribusi ternak sebanyak 275 ekor ke 14 kelompok tani ternak penerima dari total 38 kelompok tani ternak dengan jumlah ternak keseluruhan sebesar 760 ekor.

F.2. Belanja Anggaran PC PEN

Pada tahun 2021 Balai Besar Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan mendapatkan alokasi dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp17.727.500.000,00. Dana tersebut digunakan pada beberapa akun belanja sebagai berikut:

Jenis Penggunaan	Nilai Pagu (RP)	Nilai Realisasi (RP)
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	275.000.000	274.750.300
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	290.000.000	289.908.200
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	699.000.000	698.531.311
532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	581.000.000	580.567.000
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25.000.000	23.890.000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	4.730.000
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	8.100.000
524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	210.000.000	209.597.140
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	393.500.000	250.892.600
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	0
524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	840.000.000	705.916.204
526322 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	14.394.000.000	9.004.100.000
Jumlah	17.727.500.000	12.050.982.755

Penggunaan anggaran PC PEN akun 521131 senilai Rp274.750.300,00 diantaranya untuk pengadaan 1 buah Capilar, 1 paket penggantian contractor sneijder LCID50A, 1 paket perbaikan hardware PC dan sistem aplikasi, penyebaran informasi pembangunan pertanian/TV tani, 1 paket pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin, 1 paket pemeliharaan stabilizer dan cubicle gedung utama.

Penggunaan dana PC PEN akun 521241 senilai Rp289.908.200 diantaranya untuk Kalibrasi fee poor balance, Vaksinasi rabies untuk 22 karyawan, belanja non operasional vortex mixer, belanja sarana kantor, belanja non operasional, inhouse training ISO 17043:210, sertifikasi ISO 9001, enhancement aplikasi SIHAPSOH, belanja komputer dan ATK untuk sistem mutu, pengadaan buletin 100 buah, 1 paket penyebaran informasi TV Tani.

Penggunaan dana PC PEN akun 521841 senilai Rp 698.531.311,00 digunakan untuk 1 kegiatan rabies day, 1 paket kalibrasi peralatan farmasetik, 1 paket belanja sarana prasarana pengujian, 1 paket belanja barang persediaan, 1 paket sarana prasarana kantor untuk audit WBK.

Penggunaan dana PC PEN akun 532119 senilai Rp580.567.000,00 untuk Pengadaan 1 unit Biological Safety Cabinet, Pengadaan 8 Storage Cabinet.

F.3. Piutang Pada PT Ziya Sunanda

Piutang Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan kepada PT. Ziya Sunanda sebesar Rp580.910.000,00 disebabkan adanya pemutusan kontrak kerja terhadap pengadaan peralatan laboratorium berupa peralatan mesin Kjeldahl Merk Buchi senilai Rp2.904.550.000,00, dikarenakan PT. Ziya Sunanda tidak mampu memenuhi pengadaan peralatan laboratorium seperti yang tercantum pada kontrak pengadaan Nomor: 27003/PL.030/F5.I/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, dimana pada kontrak tersebut tercantum jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak berakhir pada tanggal 26 April 2021. Piutang tersebut merupakan uang muka sebesar 20% dari total nilai kontrak. Disamping uang muka sebesar 20%, piutang kepada PT. Ziya Sunanda juga berupa jaminan pelaksanaan dari uang muka yang diberikan senilai Rp145.275.500,00.

Kontrak kerja pengadaan peralatan laboratorium dengan PT. Ziya Sunanda dilakukan melalui 2 kali addendum sehubungan dengan masa berakhirnya kontrak pengadaan namun penyedia belum mampu menyediakan peralatan laboratorium. Addendum kontrak pertama dilakukan pada tanggal 22 April 2021 dengan Nomor: 22001/PL.030/F5.I/04/2021 dan berlaku sejak 24 April 2021 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalender dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2021.

Addendum kedua dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor: 08019/PL.030/F5.I/06/2021. Addendum kedua berlaku sejak 16 Juni 2021 dengan jangka waktu penyelesaian kerja selama 50 hari kalender dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2021. Sampai batas waktu penyelesaian penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati maka dilakukan pemutusan kontrak kerja pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan surat pemutusan kontrak Nomor: 14005/PL.030/F.I/10/2021. Dengan demikian PT. Ziya Sunanda harus segera mengembalikan uang muka dari pengadaan tersebut senilai Rp580.910.000,00 dan jaminan pelaksanaan senilai Rp145.275.500,00 dalam waktu 7 hari.

Sampai batas akhir 7 hari masa pengembalian PT. Ziya Sunanda belum melakukan pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan, sehingga dibuatkan billing tagihan. Penagihan senilai Rp580.910.000,00 tercantum pada kode billing nomor: 820220125609767 tanggal 25 Januari 2022 dengan tanggal kadaluwarsa 1 Februari 2022, sedangkan penagihan senilai Rp145.275.500,00 tercantum pada kode billing 82020125611010 tanggal 25 Januari dan tanggal kadaluwarsa 1 Februari 2022.